

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Zakiyudin (2013:2) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison (2013:3) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah Suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan serta melaporkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai bidang-bidang kekhususan sebagai akibat dari perkembangan dan tuntutan zaman. Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditunjukkan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatannya utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.
8. Akuntansi Organisasi Nir laba (*Non Profit Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”.

2.1.1.3 Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.1.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter”

Menurut Kasmir (2013:8) mengemukakan beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan odal perusahaan.

6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.

2.1.1.5 Jenis Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:22) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca (*balance sheet*)
2. Laporan laba rugi (*income statement*)
3. Laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*)
4. Laporan arus kas (*cash flow statement*)
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*).

Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adri (2012:30) adalah sebagai berikut:

1. Laporan laba rugi (*statement of income*) dan/atau laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*) selama periode.
2. Laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equities*) selama periode.
3. Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) pada akhir periode.
4. Laporan arus kas (*statement of cash flows*) selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
6. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan

keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.”

2.1.2 Pajak Tangguhan

2.1.2.1 Definisi Pajak Tangguhan

Menurut Dwi Martani dkk (2015:251-252) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Perbedaan antara keduanya berlaku umum hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan sama, namun memiliki cara pengaturan yang berbeda. Perbedaan yang muncul misalnya terkait dengan perhitungan depresiasi, pengaturan beberapa beban dan penghasilan yang menurut pajak diakui dengan basis kas, pengaturan atas penghasilan yang menurut pajak diatur dengan ketentuan khusus dan pengaturan beberapa beban yang menurut pajak tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan permanen. Namun jika dilihat dari dampak akhirnya dapat diklasifikasikan atas perbedaan positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi jika laba akuntansi lebih besar dari laba pajak dan sebaliknya. Perbedaan yang mengandung konsekuensi pengakuan pajak tangguhan menurut akuntansi adalah perbedaan temporer”.

Pengertian pajak tangguhan menurut Diana Sari (2014:289) yaitu sebagai berikut:

“Perbedaan yang terjadi akibat perbedaan PPh Terutang dengan Beban Pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial”.

Pengertian pajak tangguhan menurut Karianton Tampubolon (2017:255)

yaitu:

“Pajak tangguhan tidak dapat dijadikan sebagai unsur untuk menghitung kewajiban perpajakan kepada kantor pajak, dan dicatat untuk mencerminkan jumlah utang pajak pada posisi laporan keuangan dalam tahun buku atau periode tertentu”.

Pengertian pajak tangguhan menurut Hadimukti (2012) yaitu

sebagai berikut:

“Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak. Besarnya laba pajak tangguhan (*deferred tax*) dapat dilihat pada laporan keuangan (neraca) perusahaan pada tahun berjalan. Perhitungan untuk pajak tangguhan yang dijadikan ukuran adalah dengan menyesuaikan pada PSAK No 46 tentang pajak penghasilan”

Pajak tangguhan menurut Early Suandy (2011:99) adalah sebagai berikut:

“Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya jika berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak tangguhan adalah perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak. Penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak.

Menurut PSAK 46 pajak tangguhan dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Deferred Tax} = \frac{DTE_{it}}{ATA_i}$$

Dimana:

DTE_{it} = *Deferred tax expense* (perusahaan i tahun t)

ATA_i = *Average total assets* yang diperoleh dari total aset perusahaan i tahun t ditambah dengan perusahaan i tahun t-1 kemudian dibagi 2

2.1.2.2 Metode Pajak Tangguhan

Metode pajak tangguhan menurut Diana Sari (2014:293) adalah sebagai berikut:

“Perhitungan pajak tangguhan dengan menggunakan metode pajak tangguhan, cenderung penekanannya kepada berapa besar pajak yang dapat dihemat pada saat ini. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak pada saat munculnya perbedaan temporer tersebut, untuk selanjutnya dihitung berapa besar beban pajaknya. Apabila terjadi perubahan tarif pajak pada periode berikutnya atau adanya pengenaan pajak baru, hal ini tidak akan mengubah jumlah pajak tangguhan yang telah dihitung tersebut”.

2.1.2.3 Kewajiban Pajak Tangguhan Dan Aktiva Pajak Tangguhan

Menurut Diana Sari (2014:298), kewajiban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan (*deferred tax*) atas “*future tax effects*” dengan menggunakan pendekatan “*the asset and liability method*”, yang berbeda dengan pendekatan “*income statement liability method*” yang sebelum ini lazimnya digunakan oleh perusahaan dalam menghitung pajak tangguhan.

Kewajiban pajak tangguhan, maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila penghasilan sebelum pajak (*pretax accounting income*) lebih besar dari penghasilan kena pajak (*taxable income*), maka beban pajak

(*tax expense*) pun akan lebih besar dari pajak terutang (*tax payable*), sehingga akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liability*). Kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai.

2. Sebaliknya apabila Penghasilan Sebelum Pajak lebih kecil dari penghasilan kena pajak, maka beban pajaknya akan juga lebih kecil dari pajak terutang, sehingga akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut dipulihkan”.

Menurut Harnanto (2016:115) kewajiban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan adalah efek atau konsekuensi pajak periode mendatang dari perbedaan temporer, yang secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*)
2. Perbedaan temporer boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*)”.

2.1.2.4 Penyajian Pajak Tangguhan Di Neraca

Penyajian pajak tangguhan di neraca menurut Diana Sari (2014:317) adalah:

“Akun pajak tangguhan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang diklasifikasi sebagai jumlah lancar neto (*net current amount*) dan jumlah tidak lancar neto (*net noncurrent amount*). Masing-masing aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan tersebut diklasifikasikan sebagai *current* atau *noncurrent* didasarkan kepada keterkaitan dengan klasifikasi aktiva atau kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dianggap ada keterkaitan apabila terdapat reduksi aktiva atau kewajiban yang akan menyebabkan timbulnya perbedaan waktu pemulihan atau sebaliknya. Apabila terdapat pajak tangguhan yang tidak terkait dengan aset atau kewajiban yang spesifik, maka klasifikasinya apakah termasuk akun lancar atau akun tidak lancar akan sangat tergantung padaantisipasi jangka waktu pemulihan atas perbedaan temporer tersebut:

1. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu setahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai akun lancar.
2. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu lebih dari setahun, maka diklasifikasikan sebagai akun tidak lancar.

Sebelum disajikan di neraca antara aktiva pajak tangguhan dengan kewajiban pajak tangguhan dilakukan saling menghapus (*offset*) terlebih dahulu sehingga akan menghasilkan (1) *net current* atau (2) *net noncurrent* dengan catatan antara akun lancar (*current account*) dan akun tidak lancar (*noncurrent account*) tidak dapat saling menghapus”.

Menurut Karianton Tampubolon (2017:261) yaitu sebagai berikut:

“Perhitungan aset pajak tangguhan dengan pendekatan neraca dilakukan dengan menggunakan akun-akun yang terdapat pada neraca, yaitu saldo yang terdapat pada aktiva dan kewajiban yang mengandung unsur koreksi fiskal temporer, seperti saldo aktiva yang dapat disusutkan dan kewajiban utang guna usaha. Tekniknya adalah demikian:

1. Jika nilai harta akuntansi lebih kecil dari nilai buku harta fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *deffered tax assets*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
2. Jika nilai harta akuntansi lebih besar dari nilai buku harta fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *deffered tax liabilities*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
3. Jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih besar dari nilai buku kewajiban fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *deffered tax assets*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
4. Jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih kecil dari nilai buku kewajiban fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *deffered tax liabilities*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku”.

2.1.2.5 Penyajian Pajak Tangguhan Di Laporan Laba Rugi

Penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi menurut Karianton

Tampubolon (2017:257) adalah sebagai berikut:

“Beda temporer dapat berupa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Dalam menghitung pajak tangguhan koreksi fiskal positif menimbulkan adanya pengakuan *income* dan koreksi fiskal negatif menimbulkan adalah pengakuan *expense*. Rugi fiskal yang terdapat pada SPT PPh Badan masih dapat dikompensasi kepada perhitungan PPh badan tahun berikutnya, diperlukan untuk menambah aktiva pajak tangguhan”.

Penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi menurut Diana Sari (2014:320) adalah sebagai berikut:

“Beban atau keuntungan pajak penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi, harus dipecah atas dua dokumen:

1. Pajak Kini (Pajak Penghasilan Terutang)
2. Bagian dari pajak tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai beban pajak, yang dihitung berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan tarif)

Beban/keuntungan pajak hendaknya dialokasikan pada operasi yang berlanjut, operasi yang tidak berlanjut, hal-hal yang luar biasa, pengaruh kumulatif perubahan akuntansi dan penyesuaian pada periode sebelumnya. Pendekatan ini adalah semacam pendekatan alokasi pajak *intra period*. Dapat ditambahkan, bahwa komponen-komponen yang signifikan yang terkait dengan beban pajak yang diakibatkan oleh operasi yang berlanjut, dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Beban/keuntungan pajak kini
2. Beban/keuntungan pajak tangguhan, terpisah dari komponen lain yang tercatat
3. Kredit pajak investasi
4. Bantuan pemerintah (pada tingkat tertentu merupakan pengurangan beban pajak penghasilan)
5. Keuntungan karena kompensasi kerugian (juga mengakibatkan pengurangan beban pajak penghasilan)
6. Beban pajak yang dihasilkan dari alokasi keuntungan pajak tertentu, baik terhadap modal yang disetor maupun menurunkan nilai *goodwill* atau aset tidak berwujud *noncurrent* lainnya dari entitas yang bersangkutan.
7. Penyesuaian kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan akibat perubahan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan atau perubahan status perusahaan yang bersangkutan.
8. Penyesuaian saldo penyisihan penilaian pada awal tahun akibat perubahan keadaan yang menyebabkan perubahan pertimbangan terhadap kemampuan realisasi aset pajak tangguhan dimasa-masa yang akan datang.

Perhitungan seluruh beban pajak penghasilan didasarkan kepada penghasilan sebelum pajak (*pretax accounting income*) dalam laporan keuangan komersial yang dikalikan dengan tarif orisinal tidak termasuk perbedaan tetap dengan catatan bahwa perusahaan juga diminta untuk menyusun rekonsiliasi (dengan presentase atau dengan mata uang yang berlaku) antara beban pajak yang berkenaan dengan operasi berkelanjutan dengan penghasilan sebelum pajak yang dikalikan dengan

tarif yang juga terkait dengan operasi berkelanjutan. Jumlah yang diperkirakan dan sifat dari setiap rekonsiliasi yang signifikan harus diungkapkan”.

2.1.3 *Tax To Book Ratio*

2.1.3.1 Definisi *Tax To Book Ratio*

Menurut Hadimukti (2012:472) pengertian *tax to book ratio* yaitu:

“*Tax to book ratio* adalah perbandingan antara ratio penghasilan kena pajak (*taxable income*) terhadap Laba Akuntansi (*Book Income*) dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan”.

Menurut Suparman (2011:13) pengertian *tax to book ratio* adalah sebagai berikut:

“Persepsi Rasio Pajak adalah perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak terhadap Laba Akuntansi dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan”.

Menurut PSAK 46 *tax to book ratio* dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Tax to Book Ratio} = \frac{TI_{it}}{PTB_{it}}$$

Dimana:

TI_{it} = Laba fiskal atau laba kena pajak (perusahaan i tahun t)

PTB_{it} = Laba akuntansi atau laba sebelum pajak (perusahaan i tahun t).

2.1.4 Kinerja Perusahaan

2.1.4.1 Definisi Kinerja Perusahaan

Kinerja merupakan hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi atau perusahaan tersebut bersifat profit oriented atau nonprofit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.

Menurut Mulyadi (2007:337) pengertian kinerja adalah sebagai berikut:

“Kinerja adalah keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan.”

Menurut Pabundu Tika (2010:121) menyatakan bahwa kinerja adalah sebagai berikut:

“Kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu”.

Menurut Moehariono (2012:95) pengertian kinerja adalah sebagai berikut:

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi perusahaan yang dituangkan melalui perancangan strategis suatu perusahaan”.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja adalah kemampuan atau prestasi yang dicapai di dalam melaksanakan suatu tindakan tertentu.

Menurut Irham Fahmi (2013:3) kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

“Kinerja organisasi atau perusahaan adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usahayang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif”.

Menurut Wahyudin Zarkasyi (2008:48) menyatakan kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

“Sesuatu yang dihasilkan oleh organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dengan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati”.

Menurut Surjadi (2009:7) pengertian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

“Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar dan totalitas hasil kerja yang dicapai suatu perusahaan tercapai tujuan, kinerja suatu perusahaan itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana perusahaan dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Imam Widodo (2011:9) pengertian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

“Suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki”.

Menurut Payaman J. Simanjatak (2011:3) pengertian kinerja perusahaan adalah:

“Kinerja perusahaan adalah agregasi atau akumulasi kinerja semua unit-unit organisasi, yang sama dengan penjumlahan kinerja semua orang atau individu yang bekerja diperusahaan”.

Menurut Helfert (2013:67) pengertian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

“Company performance is a result made by the management on an ongoing basis. In this case, the intended outcome is the result of many individual decisions”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil yang diperoleh seseorang atau kelompok dalam organisasi atau perusahaan atas berbagai peran dan fungsi kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka dilakukan pengukuran kinerja dan menggambarkan kondisi sesungguhnya suatu perusahaan agar perangkat penting perusahaan seperti pemegang saham dapat mengetahui tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan.

2.1.4.2 Pengukuran Kinerja Perusahaan

Pada dasarnya pengukuran kinerja merupakan alat pengendalian bagi perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kinerja operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, melalui pengukuran kinerja perusahaan juga dapat memilih strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Moeheriono (2012:96) pengertian pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah:

“Pengukuran kinerja (*performance measurement*) suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengolahan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan perusahaan”.

Menurut Irham Fahmi (2012:71) pengertian pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

“Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah kualifikasi dari efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi”.

Menurut Wibowo (2009:7) pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses menghitung efisiensi atau efektifitas suatu kegiatan”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian pengukuran kinerja adalah suatu usaha formal yang dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktifitas perusahaan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan pada suatu periode tertentu.

Menurut Irham Fahmi (2015:136), pengukuran kinerja perusahaan dapat diukur dengan:

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

Menurut Sugiyono (2010:39), pengukuran kinerja perusahaan dapat diukur dengan:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

Menurut Kasmir (2008:199-207), pengukuran kinerja perusahaan dapat diukur dengan:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

$$\text{ROI} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total asset}}$$

2.1.4.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Perusahaan

Pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang paling penting dalam proses pengendalian.

Menurut Atty Tri Juniarti (2012:60) tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

“Untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan untuk menilai kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya, agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan”.

Secara umum, tujuan perusahaan mengadakan pengukuran kinerja perusahaan adalah untuk :

1. Menetapkan kontribusi masing-masing divisi atau perusahaan secara keseluruhan atau atas kontribusi dari masing-masing sub divisi dari suatu divisi (ekonomi/evaluasi segmen).
2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kerja masing-masing divisi (evaluasi manajerial).
3. Memotivasi para manajer divisi supaya konsisten mengoperasikan divisinya sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan (evaluasi operasi).

2.1.4.4 Manfaat Pengukuran Kinerja Perusahaan

Pengukuran kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen program secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik (*feedback*), yang merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang.

Menurut Ismail Nawawi Uha (2013:235) mengatakan pengukuran kinerja sangat penting peranannya sebagai alat manajemen untuk :

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksana kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Menurut Mulyadi (2008:417) manfaat kinerja perusahaan adalah sebagai

berikut :

1. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel, seperti promosi, transfer dan pemberhentian.
2. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimum.
3. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
4. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personel dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel.

2.1.4.5 Masalah Pengukuran Kinerja Perusahaan

Kecenderungan yang sering dalam pengukuran kinerja perusahaan adalah mengukur hasil akhir, hal ini biasanya dikaitkan dengan finansial. Jika hal tersebut tidak memenuhi target yang telah direncanakan maka kinerja dikatakan buruk. Menurut Dale Furtwengler (2002:11) yang dialihbahasakan oleh Fandy Tjiptono, ada beberapa masalah dalam pengukuran kinerja, yaitu:

1. “Tidak semua hasil dapat diukur
2. Ukuran lain yang bermanfaat adalah yang terlupakan”.

Pengukuran kinerja dengan pendekatan diatas kurang akurat untuk ditetapkan karena pengukuran kinerja memiliki sasaran dan tujuan yang lebih dari sekedar teknik untuk mengukur, melainkan sebagai identifikasi kelemahan proses yang ada.

2.1.4.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan

Menurut Atmosoeparto dalam Tangkilisan (2005:181) mengemukakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Eksternal, yang terdiri dari :
 - a. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan, kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
 - b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar.
 - c. Faktor social, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.
2. Faktor Internal, yang terdiri dari :
 - a. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin di produksi oleh suatu organisasi.
 - b. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan di jalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.
 - c. Sumber daya manusia, yaitu kuliatas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan”.

2.1.4.7 Metode Pengukuran Kinerja Perusahaan

Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja. Pengukuran kinerja tersebut ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Menurut Wibowo (2009:13) sistem pengukuran kinerja terdiri dari beberapa metode yaitu :

“Prosedur perencanaan dan kontrol pada proyek pembangunan US. Railroad (1860-1870).

1. Awal abad ke-20, Du Pont Firm memperkenalkan return of investment (ROI) dan the pyramid of financial ratio serta general motor mengembangkan innovative management accounting of the time.
2. Sejak tahun 1925, pengukuran kinerja finansial telah dikembangkan sampai sekarang, diantaranya discount cash flow (DCF), residual income (RI), economic value added (EVA) dan cash flow return on investment (CFROI).
3. Keegan et al (1989) mengembangkan performance matriks yang mengidentifikasi pengukuran dalam biaya dan non biaya.
4. Maskel (1989) memprakarsai penggunaan performance measurement berbasis world class manufacturing (WCM) dengan pengukuran kualitas, waktu, proses dan fleksibilitas.
5. Cross dan Linch (1988-1989) mengembangkan hubungan antara kriteria kinerja dalam piramid kinerja.
6. Dixon et.al (1990) mengenalkan questionnaire pengukuran kinerja.
7. Brignal et.al (1991) menerapkan konsep non-finansial.
8. Azzone et.al (1991) memprakarsai tentang pentingnya kriteria waktu pada penggunaan matrik.
9. Kaplan dan Norton (1992, 1993) memperkenalkan balance scorecard sebagai konsep baru pengukuran kinerja dengan empat pilar utama yaitu: finansial, konsumen, internal proses dan inovasi.
10. Pada tahun 2000, Chris Adam dan Andy Neely memperkenalkan suatu pengukuran kinerja yang mengedepankan pentingnya menyelaraskan aspek perusahaan (stakeholder) secara keseluruhan dalam suatu framework pengukuran yang strategis. Konsep pengukuran kinerja ini dikenal dengan istilah Performance Prism.”

2.1.4.8 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang menjadi nilai perusahaan yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Variable	Hasil Penelitian
I Made Dwi Harmana dan Ketut AlitSuardana (2014)	Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax Book Ratio terhadap Kinerja Perusahaan	Pajak Tangguhan (X_1) <i>Tax Book Ratio</i> (X_2) Kinerja Perusahaan (Y)	- Pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan - Tax Book Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
Elyabet I. Marpaung dan Lauw Tjun Tjun (2016)	Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax Book Ratio terhadap Kinerja Perusahaan	Pajak Tangguhan (X_1) <i>Tax Book Ratio</i> (X_2) Kinerja Perusahaan (Y)	- Pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan - Tax Book Ratio berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
Yani Aprillia, Helliana dan Diamonalisa (2016)	Pengaruh Pajak Tangguhan dan <i>Tax to Book Ratio</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Pengaruh Pajak (X_1) <i>Tax Book Ratio</i> (X_2) Kinerja Keuangan Perusahaan (Y)	- Pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan - Tax Book Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

Benny Casanova dan Marsellisa Nindito (2013)	Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Rasio Pajak Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan	Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan (X_1) Rasio Pajak (X_2) kinerja Laporan Keuangan perusahaan (Y)	- Aktiva pajak tanggungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan - Ratio Pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
Fitri Apriliana (2017)	Analisis pengaruh pajak tanggungan terhadap kinerja perusahaan	Pajak tanggungan (X_1) Kinerja perusahaan (Y)	- Pajak tanggungan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
Iqbal Bukhori (2012)	Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan	Good Corporate Governance (X_1) Ukuran Perusahaan (X_2) Kinerja Perusahaan (Y)	- Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan - Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian I Made Dwi Harmana dan Ketut Alit Suardana (2014) dengan judul “Pengaruh Pajak Tangguhan dan *Tax To Book Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan”. Perbedaannya terletak pada indikator variabel dependen, dimana peneliti sebelumnya menggunakan indikator ROI (*Return On Investment*), sedangkan penulis menggunakan indikator *Net Profit Margin* (NPM). *Net Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan, rasio ini akan menggambarkan penghasilan bersih perusahaan berdasarkan total penjualan. Pengukuran rasio dapat dilakukan dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih

(Irham Fahmi, 2015:136). Adapun alasan dipilihnya *net profit margin* dari beberapa rasio profitabilitas yang ada karena *net profit margin* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari nilai laba bersih dengan total penjualan. Laba bersih merupakan salah satu keyakinan bahwa perhatian jangka panjang manajemen adalah terhadap laba bersih dan para pengguna laporan keuangan biasanya melihat pada angka paling akhir. Selain itu penjualan merupakan salah satu sumber pendapatan suatu perusahaan dari adanya transaksi jual dan beli, dalam suatu perusahaan apabila semakin besar penjualan maka akan semakin besar pula keuntungan perusahaan tersebut, oleh karena itu nilai penjualan sangat penting dimana nilai itu berpengaruh nantinya terhadap laba yang diperoleh perusahaan, dimana laba tersebut nantinya menjadi perhatian para calon investor dalam menanamkan saham nya di perusahaan tersebut. Tempat penelitian dari peneliti sebelumnya yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Pertambangan subsektor Logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, tahun penelitian yang dilakukan penulis periode 2011-2015 sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian periode 2010-2011.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara (Siti Resmi, 2014). Upaya tersebut ditempuh dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain (Siti Resmi, 2014). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak (Siti Resmi, 2014). Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perbedaan kedua dasar perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Siti Resmi, 2014). Perbedaan laba sebelum pajak dengan jumlah laba kena pajak akibat adanya perbedaan standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan disebut dengan *book tax differences* yang akhirnya akan meningkatkan jumlah beban pajak tangguhan (Christina dkk, 2010).

Perbedaan standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dapat membuka peluang adanya kecurangan dalam mengungkapkan laba karena peraturan dalam perpajakan bisa dijadikan jalan bagi manajemen untuk

membenarkan standar akuntansi keuangan yang menyimpang dengan cara perencanaan pajak yang ilegal. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan baik tercermin dari adanya perbedaan yang tidak terlihat terlalu besar antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Hal tersebut dapat dilihat pada rasio laba pajak terhadap laba akuntansi (*tax to book ratio*) (Ferry dan Anna, 2014).

Dari pemaparan di atas tersebut, adapun pengaruh dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Kinerja Perusahaan

Menurut PSAK No. 46 pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dikompensasi pada periode mendatang. Bila dampak pajak di masa mendatang tersebut tidak tersaji dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif, maka bisa saja laporan keuangan menyesatkan pembacanya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadumukti (2012) menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hadimukti (2012) dalam artikelnya menyatakan bahwa:

“Besarnya perbedaan laba akuntansi dan laba pajak yang terlihat pada semakin besarnya pajak tangguhan bernilai positif pada perusahaan menunjukkan semakin besar pula kemungkinan pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba. Tindakan tersebut mengakibatkan laba akuntansi yang dilaporkan menjadi tidak berkualitas, sehingga kinerja

perusahaan dikhawatirkan dapat mengalami penurunan di masa mendatang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harmana dan Suardana (2014) menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Harmana dan Suardana (2014) dalam artikelnya menyatakan bahwa:

“Ketika perusahaan mampu melakukan manajemen pajak yang baik, dapat membantu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan juga mengindikasikan perlunya para investor untuk mempertimbangkan pajak tangguhan dalam suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Semakin besar pajak tangguhan maka akan semakin baik kinerja perusahaan”.

Kevin Aris Pranata (2016) berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa pengungkapan pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kevin Aris Pranata (2016) dalam artikelnya menyatakan bahwa:

“Kewajiban pajak tangguhan dikatakan mampu mempengaruhi laba karena pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba, dan kewajiban pajak tangguhan sendiri mencerminkan besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin tinggi pajak yang perlu dilunasi oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi pula laba dari perusahaan tersebut”.

2.2.2 Pengaruh *Tax To Book Ratio* terhadap Kinerja Perusahaan

Tax to book ratio merupakan perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak terhadap laba akuntansi dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan. Kinerja perusahaan dikatakan baik ketika perusahaan memiliki perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang minim, perbedaan minim tersebut dapat terlihat dari nilai *tax to book ratio* yang rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa *deferred tax* dan *tax to book ratio* akan memiliki pengaruh atas tinggi rendahnya kinerja dari suatu perusahaan.

Hasil penelitian Kevin Aris Pranata (2016) menemukan bahwa pengungkapan *tax to book ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kevin Aris Pranata (2016) dalam artikelnya menyatakan bahwa:

“Semakin besar perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan fiskus maka akan memberikan anggapan bahwa perusahaan tidak mampu merencanakan pajak yang sesuai dengan aturan pajak yang ada. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi laba karena pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba dari suatu perusahaan”.

Hadimukti dan Endang Kiswara (2012) berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa *tax to book ratio* (rasio pajak) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hadimukti dan Endang Kiswara (2012) dalam artikelnya menyatakan bahwa:

“Semakin kecil *tax to book ratio* maka laba perusahaan akan menjadi rendah dan kemungkinan resiko investasi kepada investor/kreditor menjadi tinggi, resiko investasi yang tinggi merupakan estimasi bahwa emiten tidak dapat membayar kewajiban jangka panjangnya. Semakin besar *tax to book ratio* maka perusahaan akan meminimalisasi pembayaran pajak dan akan meningkatkan kas untuk membayar kewajiban jangka panjang, perusahaan akan menghindari pembayaran pajak kemungkinan resiko yang akan didapat oleh investor/kreditor menjadi lebih tinggi”.

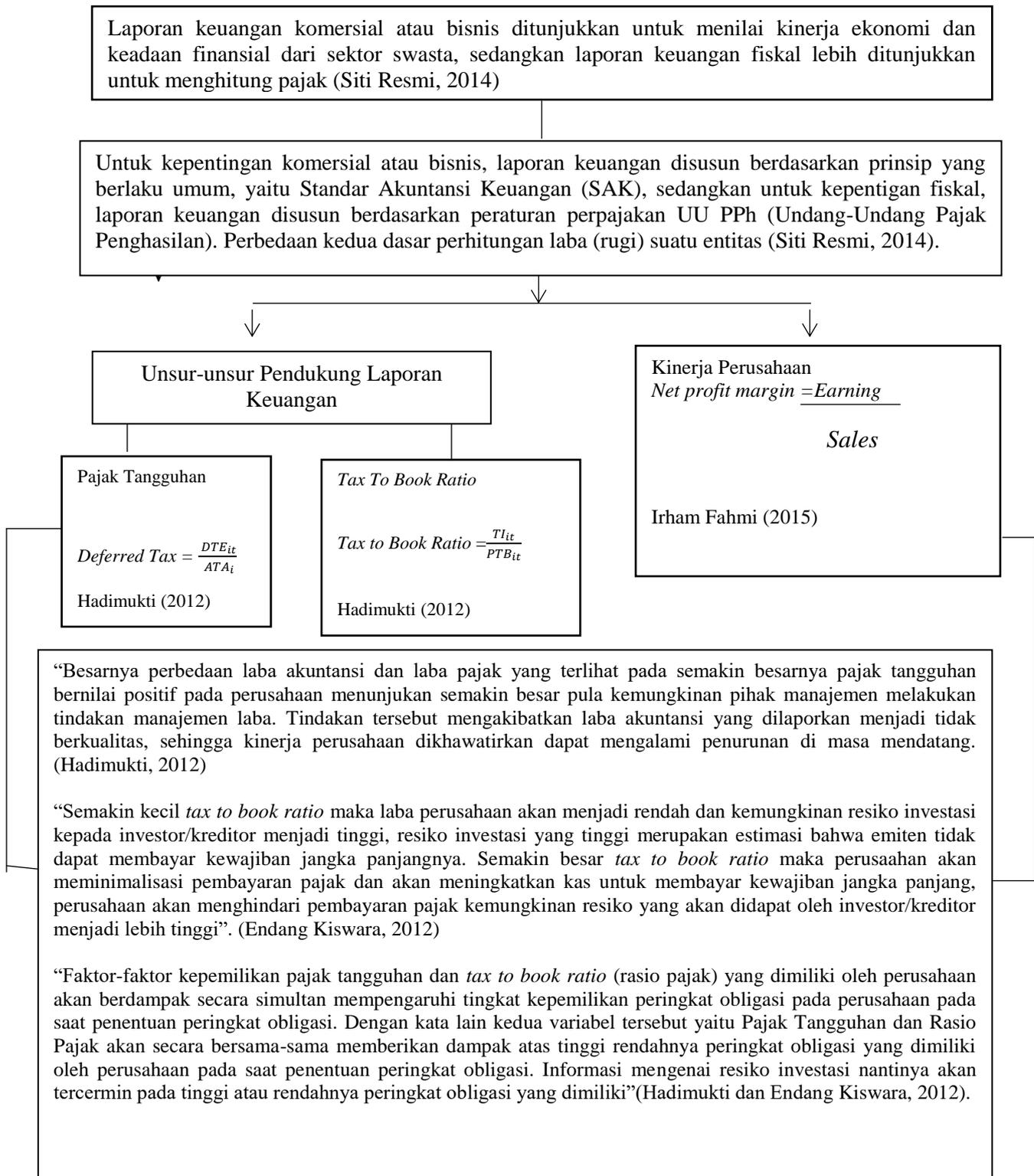
Menurut Admaja et al (2011) berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa *tax to book ratio* (rasio pajak) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Menurut Admaja et al (2011) dalam artikelnya menyatakan bahwa:

“Peningkatan *tax to book ratio* menunjukkan performa perusahaan dalam menghasilkan laba semakin besar sehingga menciptakan image positif bagi pelaku pasar untuk segera berinvestasi di dalam perusahaan.”

2.2.3 Pengaruh Pajak Tangguhan Dan *Tax To Book Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan

Hadimukti dan Endang Kiswara (2012) berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa pajak tangguhan dan *tax to book ratio* (rasio pajak) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hadimukti dan Endang Kiswara (2012) dalam artikelnya menyatakan bahwa:

“Faktor-faktor kepemilikan pajak tangguhan dan *tax to book ratio* (rasio pajak) yang dimiliki oleh perusahaan akan berdampak secara simultan mempengaruhi tingkat kepemilikan peringkat obligasi pada perusahaan pada saat penentuan peringkat obligasi. Dengan kata lain kedua variabel tersebut yaitu Pajak Tangguhan dan Rasio Pajak akan secara bersama-sama memberikan dampak atas tinggi rendahnya peringkat obligasi yang dimiliki oleh perusahaan pada saat penentuan peringkat obligasi. Informasi mengenai resiko investasi nantinya akan tercermin pada tinggi atau rendahnya peringkat obligasi yang dimiliki”.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:93) “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang dikemukakan maka penulis dapat merumuskan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Hipotesis1 : Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

Hipotesis2 : *Tax Book Ratio* berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

Hipotesis3 : Pajak Tangguhan dan *Tax Book Ratio* berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan